



**KOMPARASI PROSES INOVASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH**

**COMPARISON OF INNOVATION PROCESSES IN THE PERSPECTIVE OF LOCAL GOVERNMENT
POLICY AND REGIONAL COMPETITIVENESS**

DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i1.2050>

**Andjar Prasetyo^{✉1}, Hotnier Sipahutar², Asrori³, Gunawan⁴, Deden Nuryadin⁵, Catur
Wibowo Budi⁶**

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah,

^{2,3,4,5,6} Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

[✉] andjar.prasetyo1@gmail.com

Abstrak

Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis proses inovasi, kebijakan dalam proses inovasi dan mengevaluasi daya saing daerah hasil proses inovasi yang terjadi di empat wilayah, Kota Magelang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Tuban. Analisis deskripsi secara kualitatif digunakan dalam kajian ini berupa interaksi langsung terhadap empat daerah tersebut. Data primer yang digunakan berasal dari proses observasi langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh sampling studi. Pelaksanaan kajian selama Sembilan bulan dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan Agustus 2019. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan memiliki peran prioritas dalam proses inovasi, proses inovasi memiliki kemampuan mendorong daya saing daerah, daya saing daerah menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan daerah.

Kata kunci: Proses Inovasi, Kebijakan Pemerintah, Daya Saing Daerah.

Abstract

Regional competitiveness is an indicator of development that can be pursued by innovation, innovation in the process requires commitment in the form of policy, this is what distinguishes developmental development between regions. The purpose of this study is to analyze the innovation process, policies in the innovation process and evaluate the regional competitiveness of the innovation process that occurs in four regions, Magelang City, Pekanbaru City, Labuhanbatu Regency and Tuban Regency. Descriptive analysis is used qualitatively in this study in the form of direct interaction with the four regions. The primary data used comes from the direct observation process, while secondary data are sourced from official documents published by the study sampling. The nine-month study began in November 2018 until August 2019. The findings of this study indicate that policy has a priority role in the innovation process, the innovation process has the ability to encourage regional competitiveness, regional competitiveness becomes a foothold in determining regional policies.

Keywords: Innovation Process, Government Policy, Regional Competitiveness.

PENDAHULUAN

Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. *World Economic Forum* dalam (Do, 2016) mendefinisikan “daya saing” sebagai jumlah dari institusi, kebijakan dan faktor produksi yang membentuk tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas menentukan tingkat kesejahteraan berkelanjutan dalam perekonomian. Lebih lanjut dalam (Do, 2016) Daya saing menjelaskan tujuan memperoleh pertumbuhan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menentukan bagaimana negara, wilayah, dan perusahaan akan mengelola kemampuan mereka untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Ketika dua negara bersaing satu sama lain, keduanya memiliki posisi yang lebih baik; oleh karena itu daya saing didefinisikan sebagai cara yang menyediakan pengembangan dan di mana tidak ada yang kalah atau yang menang. Dalam daya saing akan tercipta apabila terjadi perubahan atau inovasi.

Inovasi (Leoncini and Montresor, 2008) sebagai proses interaktif yang melibatkan banyak orang dan seringkali juga mengubah orang di berbagai sektor. Karena itu, inovasi adalah kegiatan umum, yang tidak terbatas pada kelompok orang khusus seperti "kelas kreatif" atau "analisis simbol" atau orang yang bekerja di laboratorium Litbang. Inovasi adalah proses yang semakin melibatkan ide dan pendapat dari banyak orang yang berbeda. Ini adalah pendapat dan ide yang harus diungkapkan tetapi juga dipilih dan dikumpulkan. Inovasi membutuhkan keragaman dan kolektivitas pada saat yang sama, dan keseimbangan antara keduanya adalah aspek penting dari kegiatan inovatif saat ini. Dalam konteks

pemerintah daerah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai terjemahan dari Pasal 386 sampai dengan pasal 390 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka muncul keragaman dan kolektivitas dalam melaksanakannya.

Sementara itu potret pemerintah dalam melaksanakan amanat UU No.23 Tahun 2014, sampai sekarang masih belum memiliki konsep yang jelas, pemahaman tentang proses inovasi masih dilakukan dengan batasan kegiatan yang tidak bermuara pada kemanfaatan. Pemerintah Daerah kemudian berupaya dengan berbagai model untuk meningkatkan daya saing dengan intervensi kebijakan dan melalui proses inovasi. Kajian untuk menganalisis proses inovasi, kebijakan dalam proses inovasi dan mengevaluasi daya saing daerah hasil proses inovasi, untuk mempertajam kajian kemudian dibatasi pada empat Kabupaten/kota, Kota Magelang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Tuban. kolom.

TINJAUAN TEORI

Inovasi

Inovasi dan ide-ide baru datang dari faktor-faktor di dalam dan di luar organisasi (Chen, Duan, Edward, & Lehaney, 2006; Chong, Chong, & Gan, 2011) dalam (Distanont and Khongmalai, 2018). Dalam hal faktor internal, pemikiran, ide-ide baru, dan inovasi berasal dari transfer pengetahuan di antara karyawan, terlepas dari apakah mereka bekerja di departemen yang sama (Argote & Ingram, 2000; Distanont, Haapasalo, Rassameethes, & Lin, 2012) dalam (Distanont and Khongmalai, 2018). Terlepas dari itu, inovasi dan ide-ide baru yang datang dari luar organisasi juga penting (Blonder & Pritzl, 1992; Distanont et al., 2012; Hamel, Doz, &

Prahalad, 1989; Littler, Leverick, & Bruce, 1995; Millson, Raj, & Wilemon, 1992) dalam (Distanont and Khongmalai, 2018). Beberapa peneliti telah menemukan bahwa pengetahuan baru, sudut pandang, dan ide-ide dari luar organisasi sendiri memunculkan lebih banyak inovasi daripada dari dalam perusahaan (Hillebrand & Biemans, 2004; Littler et al., 1995) dalam (Distanont and Khongmalai, 2018). Transfer pengetahuan antar organisasi datang dalam bentuk transfer hilir, seperti transfer pengetahuan antara bisnis dan pelanggan. Transfer pengetahuan hulu mengacu pada transfer pengetahuan antara bisnis dan pemasok, universitas, atau organisasi lain. Transfer pengetahuan antara organisasi dan agensi luar adalah transfer horizontal dengan transfer pengetahuan antara bisnis dan para pesaingnya untuk tujuan pengembangan produk baru atau pengembangan inovatif, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja bisnis dan keunggulan kompetitif (Distanont and Khongmalai, 2018).

Daya Saing Daerah

Membahas daya saing daerah tentu perlu merujuk pada daya saing internasional. Dalam (Weresa, 2014) Ada banyak definisi umum tentang kemampuan bersaing internasional ekonomi nasional individu. Dari sudut pandang teoretis murni, definisi oleh JW Bossak (1984, hal. 37) sangat meyakinkan: "(...) Kemampuan bersaing internasional mungkin (...) didefinisikan hanya sebagai kemampuan untuk berjuang, bersaing untuk mendapatkan manfaat dengan partisipasi suatu negara dalam pembagian kerja internasional. Kemampuan ini bersifat relatif setidaknya dalam dua cara; pertama, terkait dengan negara lain; dan kedua, dalam kaitannya dengan kompetisi

internasional, fitur karakteristik dari tahap perkembangan tertentu. "Kemampuan kompetitif internasional paling sering didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk berjuang, bersaing untuk mendapatkan manfaat yang berasal dari pengembangan pembagian kerja sosial dan internasional. pertukaran ekonomi (Bossak 1984, hal. 37). Atas dasar teori murni, dimungkinkan untuk lebih jauh membedakan dua komponen fundamental yang berubah dari kemampuan kompetitif internasional ekonomi nasional suatu negara. Di satu sisi, itu disebut komponen nyata, dipahami sebagai bidang manajemen ekonomi aktual (objektif), sedangkan di sisi lain, komponen institusional dan instrumental, dipahami sebagai bidang regulasi, yaitu bidang ekonomi. sistem yang juga disebut sistem operasi ekonomi (Weresa, 2014).

Jelaslah bahwa, dari sudut pandang pembentukan kemampuan bersaing internasional suatu negara, masing-masing komponen yang disebutkan di atas, dan unsur-unsurnya, adalah sangat penting, termasuk yang sangat sering diremehkan, seperti iklim, infrastruktur keras (mis. jalan, jembatan, dan pelabuhan) dan infrastruktur lunak (mis., koneksi telekomunikasi), standar etika dan moral, atau agama. Lebih lanjut, komponen-komponen dan konstituen-konstituennya setiap saat saling berhubungan dan kodependen (Sulmicki 1977; Misala 2004, 2007, 2011a) dalam (Weresa, 2014).

Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan agen untuk menjual produk di pasar dan memperoleh pendapatan. Porter (1980, 1990) dalam (Artal-Tur and Kozak, 2008) mengamati bahwa karakteristik perusahaan memungkinkan mereka untuk

melampaui pesaing mereka, tetapi untuk melakukannya, perusahaan ini harus mengeksploitasi keunggulan komparatif dan kompetitif mereka (Artal-Tur and Kozak, 2008). Di tingkat global, negara bersaing di pasar internasional untuk menjual barang dan jasa mereka, dan dengan demikian, konsep daya saing berlaku secara nasional dan internasional. Efisiensi (dinamis) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017) jaringan sepenuhnya atau sebagian dalam suatu daerah mempengaruhi daya saing regional. Lagi pula, jika jaringan (sebagian) suatu daerah itu gagal mengikuti perkembangan teknologi global, maka daerah itu akan mengalami kemunduran ekonomi. Wilayah yang secara teknologi khusus (atau, lebih tepatnya, sebuah kluster atau kawasan industri) dapat tertinggal dari yang lain setiap kali berkomitmen untuk teknologi yang lebih rendah atau gagal menyerap, meniru, atau melompati teknologi yang dikembangkan di tempat lain (lihat Menzel dan Fornahl 2010; Saxenian 1994; Valdaliso et al. 2013; Hassink 2005; Martin dan Sunley 2006) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017).

Wilayah yang beragam, dalam hal ini, lebih tangguh (untuk diskusi yang luas tentang konsep ini, lihat Christopherson et al. 2010) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Dengan jaringan inovasi yang seluruhnya atau sebagian terletak di wilayah dengan kluster teknologi, dan kluster tersebut pada dasarnya bersaing pada pasar permintaan yang semakin mengglobal, karakteristik wilayah ini memiliki signifikansi kompetitif (lihat Porter 1998, 2003) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017).

Implikasi Kebijakan

Pembuat kebijakan adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk

kesejahteraan komunitas mereka. Untuk mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang lebih baik, beberapa kerangka kerja dan model telah dikembangkan untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Untuk tujuan ini, para ahli kebijakan publik dan ilmuwan kebijakan telah mengembangkan kerangka kerja, teori dan model untuk lebih memahami proses pembuatan kebijakan dan kebijakan (misalnya, Sabatier 1991, 2007; McCool 1995; Kraft dan Furlong 2007; Smith dan Larimer 2009; Birkland 2010) dalam (Gil-Garcia, Pardo and Luna-Reyes, 2018).

Di sisi lain, model lebih tepat daripada kerangka kerja karena model menggunakan asumsi spesifik tentang serangkaian variabel terbatas, diidentifikasi dalam kerangka kerja, untuk mendapatkan solusi yang tepat ketika menggabungkan variabel-variabel ini (Ostrom 2011) dalam (Gil-Garcia, Pardo and Luna-Reyes, 2018).

Selanjutnya dalam (Gil-Garcia, Pardo and Luna-Reyes, 2018) kebijakan diklasifikasikan kerangka kerja menjadi tiga kategori utama: 1) Kerangka fokus pada Tahap Kebijakan; 2) Kerangka fokus pada Lembaga; dan 3) Kerangka kerja fokus pada faktor Manusia dan Koleksi.

Kapasitas lembaga pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, dan untuk menilai efektivitas program saat ini dan opsi masa depan alternatif, sangat penting untuk kualitas proses pembuatan kebijakan. Kapasitas ini kadang-kadang disebut kapasitas 'analitik kebijakan' pemerintah (Howlett, 2009) dalam (Head *et al.*, 2014), dan evolusi keterampilan dan proses analisis kebijakan di beberapa negara baru-baru ini menjadi lebih banyak dibahas (Dobuzinskis, Howlett, & Laycock, 2007, Radin, 2000) dalam (Head *et al.*, 2014). Kekhawatiran terkait yang lebih luas adalah

apakah lembaga pemerintah telah membangun dan mempertahankan kapasitas kebijakan yang cukup untuk melakukan pekerjaan pengembangan kebijakan jangka panjang yang diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks dan tantangan baru, sebagai lawan dari pekerjaan mengelola proyek sehari-hari perhatian langsung kepada manajemen senior (Colebatch & Radin, 2006) dalam (Head *et al.*, 2014). Pertanyaan terkait adalah bagaimana konteks baru dari kontestabilitas dalam saran kebijakan, bersama dengan pengaturan baru untuk layanan kontrak dan alih daya, dapat mempengaruhi kapasitas unit kebijakan pemerintah. Sementara lembaga pemerintah modern tidak lagi dapat berharap untuk mencapai swasembada (misalnya dengan mempertahankan berbagai keterampilan dan sumber daya 'inhouse'), mereka tentu membutuhkan keahlian yang memadai untuk mengelola hubungan kontraktual dan lainnya dengan sumber-sumber keahlian eksternal dan perlu menghindari menjadi terlalu bergantung pada mereka (Head *et al.*, 2014).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sudah banyak pemangku kebijakan yang bergeser dari tradisional menuju modern, seperti dijelaskan dalam penelitian (Craft and Howlett, 2013) model yang lebih lama mengandalkan semacam proses saran kebijakan hierarkis atau 'vertikal' di mana penasihat dalam memiliki pengaruh lebih besar daripada yang di luar. Munculnya saran yang lebih pluralized memberikan lanskap daripada yang ada sebelumnya telah menantang monopoli tradisional saran kebijakan yang pernah dipegang oleh layanan publik (Halaman, 2007, 2010; Radin, 2000; Weller & Rhodes, 2001) dalam (Craft and Howlett, 2013), yaitu, seperti yang dikemukakan oleh penulis seperti Radin (2000), Prince (2007) dan Parsons (2004), model nasihat kebijakan

'berbicara kebenaran kepada kekuasaan' yang terkenal yang dikembangkan pada tahun 1970-an (Wildavsky, 1979) telah memberikan cara dalam banyak keadaan pembuatan kebijakan untuk realitas pemberian saran yang lebih lancar, plural, dan polisentris (Parsons, 2004; Prince, 2007) dalam (Craft and Howlett, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan deskriptif mencakup survei dan pertanyaan pencarian fakta dari berbagai jenis dari kebijakan, proses inovasi dan daya saing daerah. Dalam ilmu sosial dan penelitian bisnis, sering menggunakan istilah penelitian *Ex post facto* (C.R.Kothari, 2004) untuk studi penelitian deskriptif karena tidak memiliki kendali atas variabel; hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survei dari semua jenis, termasuk metode komparatif dan korelasional.

Penelitian kualitatif (C.R.Kothari, 2004), berkaitan dengan fenomena kualitatif, yaitu, fenomena yang berkaitan dengan atau melibatkan kualitas atau jenis bertujuan untuk menemukan motif dan keinginan yang mendasarinya, menggunakan wawancara mendalam untuk tujuan tersebut. Teknik lain dari penelitian tersebut adalah tes asosiasi kata, tes penyelesaian kalimat, tes penyelesaian cerita dan teknik proyeksi lainnya yang serupa. Penelitian kualitatif sangat penting dalam ilmu perilaku di mana tujuannya adalah untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia dimana kebijakan, proses inovasi dan daya saing daerah termasuk di dalamnya.

Waktu dan Tempat Penelitian

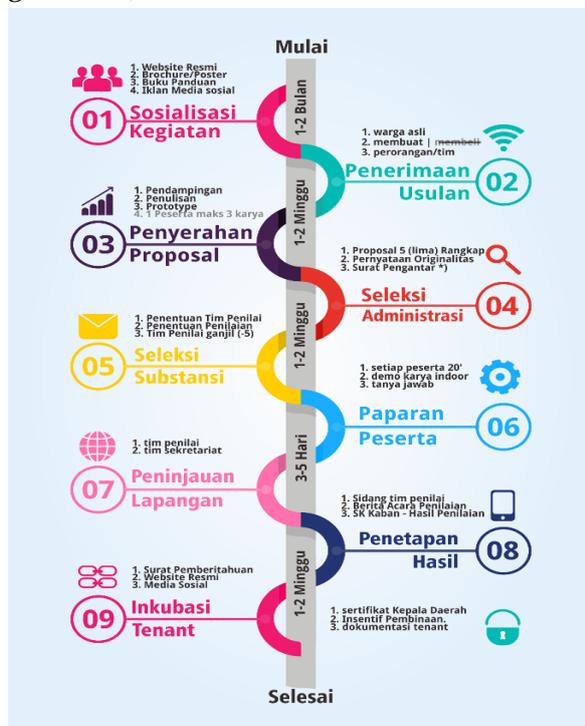
Kajian ini dilaksanakan di empat lokasi, Kota Magelang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Tuban, dengan waktu kajian mulai bulan November 2018 sampai dengan Agustus 2019 diawali proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil kajian.

Target/Subjek Penelitian

Target penelitian adalah kebijakan masing-masing daerah terhadap proses inovasi yang dilakukan, proses inovasi yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dan daya saing daerah di empat daerah.

Prosedur

Prosedur proses inovasi terdiri dari 9 tahap, dimulai dengan sosialisasi, penerimaan usulan, penyerahan proposal, seleksi administrasi, seleksi substansi, paparan peserta, peninjauan lapangan, penentuan hasil dan inkubasi peserta (lihat gambar 1.)



Sumber : Andjar, 2019

Gambar 1. Tahapan Proses Inovasi

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder sebagai data awal dalam memberikan deskripsi diperoleh dengan cara studi literatur yang berasal dari empat lokasi, sedangkan data primer bersumber dari proses interaksi dengan pelaksana proses inovasi di empat wilayah.

Teknik Analisis Data

Analisis untuk menilai praktik pengukuran konstruk dalam penelitian sosial (David J. Ketchen and Bergh, 2014). Studi sebelumnya diberi kode dan dianalisis untuk menilai cara peneliti sosial telah mengembangkan langkah-langkah untuk konstruksi utama dalam literatur sosial. Analisis konten memungkinkan untuk pemeriksaan jumlah, jenis, dan ukuran yang terkait dengan penelitian sosial dan untuk perbandingan dengan praktik pengukuran konstruk dalam penelitian, secara umum (David J. Ketchen and Bergh, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Kajian

Luas wilayah 18,54 km² Kota Magelang Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung), merupakan daerah yang memiliki luas wilayah terkecil di Jawa Tengah.

Kota Magelang dalam aspek kewilayahan memiliki 3 Kecamatan, Magelang Utara, Magelang Selatan dan Magelang Tengah. Dalam tiga kecamatan terbagi menjadi 17 Kelurahan. Dalam DATAGO penduduk Semester II - 2019 sebanyak 130.440 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 64.205 jiwa dan perempuan sebanyak 66.235 jiwa. Dijelaskan dalam Datago tersebut kondisi Semester II karena dalam inovasi Datago, data publikasi yang

bersifat umum dilakukan dalam satu tahun selama dua kali. Upaya ini merupakan upaya yang belum banyak dilakukan oleh lingkup Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tolok ukur hasil pembangunan di Kota Magelang dan umumnya wilayah lain di Indonesia ditunjukkan dengan Indikator Makro wilayah tersebut. Indikator Makro Kota Magelang dapat ditunjukkan bahwa secara keseluruhan Kota Magelang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan Metode Baru mencapai nilai sebesar 78,31 persen. Indeks Pemberdayaan Gender yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat mencapai sebesar 96,07 persen.

Selanjutnya ukuran Akuntabilitas Kinerja Kota Magelang dalam hasil pengukuran yang telah dilaksanakan memperoleh nilai LAKIP B++. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Magelang dalam hal keuangan yang digunakan dalam proses pembangunan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

Kemudian pada proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai rilis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KOPSURGAH) pada tahun 2019, Kota Magelang telah mencapai nilai sempurna sebesar 100%.

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Luas lahan terbangun (*built-up areas*) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Areal belum terbangun (*non-built up areas*) adalah sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya.

Kabupaten Labuhanbatu secara astronomis, terletak di antara $1041'$ – $2044'$ Lintang Utara dan $99^{\circ}33'$ – $100^{\circ}22'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Labuhanbatu memiliki batas-batas: Utara – Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara; Selatan – Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara; Barat – Kabupaten Labuhanbatu Utara; Timur – Provinsi Riau.

Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif, yaitu: Kecamatan Bilah Hulu; terdiri dari 24 desa; Kecamatan Pangkatan; terdiri dari 7 desa; Kecamatan Bilah Barat; terdiri dari 10

desa; Kecamatan Bilah Hilir; terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan; Kecamatan Panai Hulu; terdiri dari 7 desa; Kecamatan Panai Tengah; terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan; Kecamatan Panai Hilir; terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Rantau Selatan; terdiri dari 9 kelurahan. Kecamatan Rantau Utara; terdiri dari 10 kelurahan.

Kabupaten Tuban berada di wilayah paling barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Letak astronomi Kabupaten Tuban berada pada koordinat 111°30' - 112°35' Bujur Timur dan 6°40' - 7°18' Lintang Selatan. Panjang wilayah pantai yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah sepanjang 65 km dari mulai dari Kecamatan Palang di ujung Timur sampai Kecamatan Bancar di ujung barat. Luas wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah 22.608 Km². Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan dengan jumlah 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan) serta terbagi lagi menjadi 1.733 RW (Rukun Warga) dan 6.469 RT (Rukun Tetangga).

Proses Inovasi

Prosedur dalam metode penelitian menjadi acuan untuk proses inovasi di empat daerah tersebut dengan model Kota Magelang, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Labuhanbatu melibatkan pejabat yang memahami proses inovasi tersebut dalam tahap sosialisasi, sedangkan Kabupaten Tuban berupaya melaksanakan proses sosialisasi secara internal. Sejalan dengan apa yang disampaikan bahwa Transfer pengetahuan antara organisasi dan agensi luar adalah transfer horizontal dengan transfer pengetahuan antara bisnis dan para pesaingnya untuk tujuan pengembangan produk baru atau pengembangan inovatif, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja bisnis dan keunggulan kompetitif (Distanont and Khongmalai, 2018) dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang terhadap tiga daerah, Pekanbaru, Labuhanbatu dan Tuban. Dari proses inovasi tersebut dihasilkan inovasi yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penjaringan Inovasi di Empat Daerah Tahun 2019

Daerah	Inovasi Masyarakat	Inovasi Lembaga	Jumlah Inovasi
Magelang	30	26	56
Pekanbaru	36	15	51
Labuhanbatu	22	15	37
Tuban	27	9	36

Sumber : Data primer diolah (2019)

Inovasi lembaga dibagi dalam bentuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan kewenangan lainnya, sedangkan untuk masyarakat dibagi dalam kategori agribisnis dan pangan, energi, lingkungan hidup, perikanan dan kemaritiman, kesehatan obat-obatan dan kosmetika, pendidikan, rekayasa dan manufaktur, kerajinan dan industri rumah tangga, sosial, di mana bentuk inovasi yang dihasilkan ada yang berasal dari internal lembaga maupun eksternal lembaga. Hal ini sejalan dengan apa

yang disampaikan bahwa inovasi berasal dari transfer pengetahuan di antara karyawan, terlepas dari apakah mereka bekerja di departemen yang sama (Argote & Ingram, 2000; Distanont, Haapasalo, Rassameethes, & Lin, 2012) dalam (Distanont and Khongmalai, 2018).

Penilaian terhadap inovasi masyarakat yang diperoleh dilaksanakan dengan batasan yang telah ditentukan meliputi Kriteria : Orisinalitas / Kepioniran, Penerapan di Masyarakat, Manfaat, Keberlanjutan dan

Penguasaan Materi. Sedangkan untuk perangkat daerah dilakukan penelaian dengan batasan Kriteria : Unsur Inovasi, Kemanfaatan, Dukungan pelaksanaan, Keberlanjutan dan Proses Replikasi dan Penguasaan Materi.

Ekosistem inovasi dari data tabel 1 memberikan gambaran nyata bahwa kesiapan proses inovasi di empat daerah pada dasarnya tidak berbeda jauh, meskipun Kota Magelang masih memiliki hasil inovasi yang tertinggi secara kuantitas dengan 56 inovasi, namun replikasi yang dilaksanakan oleh ketiga daerah lainnya Pekanbaru, Labuhanbatu dan Tuban memberikan hasil yang positif, mengingat ketiga daerah tersebut baru pertama kali menggunakan model proses inovasi yang dilaksanakan di Kota Magelang.

Sistem inovasi menyediakan fungsi langsung untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Fasilitas seperti lembaga penelitian publik, layanan penelitian, dan lembaga pendidikan memengaruhi transfer, penyerapan, peniruan, eksploitasi, dan rekombinasi pengetahuan teknologi baru.

Agen pendanaan, perlindungan kekayaan intelektual, mekanisme penciptaan pasar, dan lain-lain. Merangsang penelitian dan pengembangan secara tidak langsung. Populasi aktor yang terus berkembang di kawasan ini secara aktif membentuk sistem inovasi tempat mereka berpartisipasi. Saxenian (1994) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017) dalam proses ini mengemukakan argument tentang pentingnya menyediakan studi komparatif yang luas yang menguraikan fungsi inovasi.

Implikasi Kebijakan

Dalam penelusuran terhadap empat daerah diperoleh hasil, bahwa kebijakan di Kota Magelang sudah menggunakan peraturan daerah (Perda) yang dituangkan dalam Perda Kota Magelang nomor 5 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, bahkan sudah dilengkapi dengan Peraturan Walikota Magelang nomor 55 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Magelang nomor 5 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.

Tabel 2. Struktur dan Peraturan Daerah untuk inovasi

Daerah	Struktur lembaga	Kebijakan
Magelang	Eselin II	Perda
Pekanbaru	Eselin II	-
Labuhanbatu	Eselin II	Raperda
Tuban	Eselin III	-

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 2 dapat menjelaskan kesiapan kebijakan di empat daerah, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Tuban belum memiliki peraturan daerah yang menaungi inovasi daerah, sedangkan Kabupaten Labuhanbatu sudah dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Inovasi Daerah.

Ketersediaan peraturan menjadi bentuk nyata lemahnya proses inovasi yang ditunjukkan dalam hasil pengukuran daya

saing daerah. Dalam skala nasional pun belum banyak daerah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki peraturan tentang inovasi daerah. Hal ini berdampak pada proses inovasi.

Pentingnya penyediaan regulasi tersebut sejalan dengan argumentasi bahwa pembuat kebijakan pada dasarnya memiliki tiga cara merangsang pengembangan ekonomi regional: 1) membangun jaringan inovasi atau meningkatkan efisiensi dinamis

mereka, 2) meningkatkan sistem inovasi regional, dan 3) mengubah campuran pengetahuan industri saat ini di wilayah tersebut.

Pertama, instrumen kebijakan yang berorientasi jaringan berupaya untuk melepaskan potensi penciptaan pengetahuan antar organisasi dan untuk merangsang pertumbuhan regional. Misalnya, pembentukan cluster khusus telah menjadi instrumen kebijakan umum untuk merangsang pertumbuhan regional (mis. Cumbers dan MacKinnon 2004) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Baik spesialisasi cerdas dan pembangunan metode daya saing regional menentukan bidang teknologi yang menjadi fokus (Boschma 2014) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Pendekatan spesialisasi cerdas bertujuan untuk memilih teknologi yang menjanjikan, kemudian mendukung dan memberdayakan pengusaha terpilih dalam mewujudkan potensi teknologi serta menyesuaikan (ekstra) ikatan regional antara basis pengetahuan (Foray et al. 2011) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Mengingat bahwa, eksternalitas aglomerasi Marshall mendorong daerah untuk menjadi khusus secara teknologi (lih. Neffke et al. 2011). Namun demikian, ada juga risiko nyata untuk mengunci dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional (lihat Hassink 2010; Martin dan Sunley 2006) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Untuk mencegah suatu wilayah terkunci (di salah satu dari beberapa industri yang mungkin), ia harus mencegah jaringan nilai yang aktif di industri itu untuk dikunci. Jadi, kebijakan regional harus memfasilitasi pendirian jaringan pipa lintas-regional untuk memperoleh pengetahuan teknologi.

Kedua, fungsi langsung dan pendukung untuk penelitian dan

pengembangan, transfer, penyerapan, peniruan, eksploitasi, dan rekombinasi pengetahuan teknologi baru dapat meningkatkan kondisi kerangka kerja untuk sistem inovasi regional yang dinamis dan efisien. Ini sangat penting untuk daerah yang berkinerja buruk, masing-masing membutuhkan campuran intervensi tertentu untuk meningkatkan atau memulihkan daya saing (Todtling dan Trippl 2005) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Schaffrin dan Fohr (2016) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017) mempelajari kasus transisi energi regional. Mereka dengan ini mempelajari bagaimana komunitas lokal dan tata kelola multi-level berkontribusi pada proses transisi teknologi dalam sistem inovasi regional. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa aktor lokal dari berbagai jenis paling berkualitas dalam mengadaptasi solusi untuk lingkungan lokal mereka. Para penulis menemukan bahwa, memang, inovasi lokal tergantung pada proses sosial dalam masyarakat dan pada pola tata kelola multilevel yang ada. Transisi yang efektif dan penyerapan masyarakat ditingkatkan dengan pendekatan sistem inovasi terintegrasi.

Ketiga, pendekatan ketahanan regional berupaya untuk merangsang inovasi dan mencegah penurunan (jaringan nilai di) industri di dalam perbatasannya dengan mempertahankan keragaman pengetahuan multi-industri (lih. Bristow 2010; Menzel dan Fornahl 2010) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017) dan dengan demikian memungkinkan "percabangan" (Asheim et al. 2011; Boschma 2011) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017).

Daya Saing Daerah

Indeks inovasi daerah digunakan sebagai ukuran dalam daya saing daerah dengan penjelasan pada tabel berikut

Tabel 3. Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019

Daerah	Peringkat	Skor
Magelang	3	41100
Tuban	16	11350
Labuhanbatu	20	9400
Pekanbaru	0	0

Sumber : Indeks Inovasi Daerah Kemdagri, 2019

Indikator yang digunakan dalam indeks inovasi daerah meliputi Visi Dan Misi Pemda, Tingkat Lembaga Kelitbangan, Penghargaan Untuk Inovator, Regulasi Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran Inovasi, Optimalisasi CSR, Pengelola Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Inovasi Daerah, Sosialisasi Kebijakan Inovasi, Bimtek Inovasi, Inovasi Dalam RPJMD, Program Inovasi Dalam Renstra OPD, Jejaring Inovasi, Replikasi Inovasi, Pedoman Teknis Inovasi, Tingkat Partisipasi Stakeholder, Penggunaan IT, Jumlah Inovasi Daerah, Income Perkapita, Jumlah Lapangan Kerja, Peningkatan Investasi, Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian LAKIP, Nilai IPM, Kualitas Peningkatan Perizinan, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan Layanan Informasi, Penyelesaian Pengaduan, Online System, Kecepatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan dan Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan.

Deskripsi daya saing daerah tersebut tanpa proses inovasi tidak dapat berkembang dengan baik, proses inovasi tanpa adanya intervensi kebijakan, menjadi seperti kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena lemahnya payung hukum. Oleh karenanya menjadi penting dalam proses mendorong daya saing yang perlu dilakukan secara bersama-sama.

Daya saing tidak hanya tergantung pada bidang ekonomi, tetapi juga pekerjaan di bidang sosial dan kontribusi kepada masyarakat yang dibuat oleh perusahaan (Do,

2016). Daya saing jangka panjang daerah (Vermeulen and Paier eds., 2017) tergantung pada 1) akses perusahaan di jaringan lokal ke pengetahuan yang beragam, dan 2) fungsi sistem yang mendukung proses inovasi di wilayah tersebut. Pertama, untuk mewujudkan inovasi terobosan, perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut membutuhkan akses ke kemampuan dan pengetahuan teknologi alien (meskipun terkait teknologi). Dalam wilayah khusus teknologi, perusahaan membutuhkan hubungan non-lokal (Rallet dan Torre 1999; Bathelt et al. 2004) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Di wilayah yang terdiversifikasi, "varietas yang terkait" secara teknologi dapat dengan mudah hadir di wilayah tersebut, di mana perusahaan dapat terus "bercabang" menjadi teknologi baru yang hanya mengeksploitasi hubungan lokal (Asheim et al. 2011; Boschma 2011) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017). Memang, jika ada lebih banyak klaster teknologi yang hadir di wilayah tersebut, ikatan supraregional tidak diperlukan untuk jalur pertumbuhan yang berkelanjutan (mis. Menzel dan Fornahl 2010). Kedua, proses inovasi terjadi di dalam sistem nasional (Freeman 1995; Lundvall 1992; Nelson 1993; Edquist 1997) (Vermeulen and Paier eds., 2017) dan sistem inovasi regional (Cooke 1992, 2001) dalam (Vermeulen and Paier eds., 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan yang belum kuat menyebabkan proses inovasi belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan inovasi, proses inovasi yang menggunakan Kota Magelang sebagai rujukan untuk direplikasikan di Pekanbaru, Labuhanbatu dan Tuban memiliki hasil yang positif terhadap inovasi daerah secara kuantitas. kemampuan mendorong daya saing daerah, daya saing daerah menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan daerah. Harus ada beberapa prinsip dasar untuk inovasi untuk menciptakan daya saing. Mengacu beberapa prinsip, prinsip pencapaian inovasi nasional yang dikemukakan (Atkinson dan Ezell, 2015: 89-94) dalam (Do, 2016) : 1)Kebijakan inovasi harus fokus pada memaksimalkan inovasi di semua sektor; 2)Kebijakan inovasi harus mendukung setiap jenis dan fase inovasi; 3) Mendukung penciptaan input inovasi dasar; 4)Mengembangkan inovasi nasional/daerah dan strategi produktivitas serta lembaga yang akan mendukung inovasi dan strategi ini.

Saran

Meskipun Kota Magelang telah lebih lengkap dalam konteks kebijakan dengan implementasi proses inovasi daerah yang telah mandahului dan memiliki daya saing daerah yang lebih baik namun masih memerlukan peningkatan dan penguatan inovasi daerah, utamanya pada 1)Komitmen Kebijakan inovasi secara berkelanjutan; 2)Jenis dan fase inovasi menuju daya saing daerah perlu dimediasi dengan praktik inovasi bertata kelola baik, mampu melayani public secara transparan dan akuntabel; 3) Menciptakan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap input inovasi dasar; 4)Melibatkan stakeholder terhait inovasi daerah.

Selanjutnya untuk Pekanbaru, menjadi titik tolak pengembangan proses

inovasi dengan intervensi kebijakan agar daya saing daerah tumbuh, sehingga payung hukum pelaksanaan inovasi daerah perlu untuk disiapkan dengan mengacu pada daerah yang telah direplikasikan. Sedangkan untuk Labuhanbatu, memerlukan penataan manajemen khususnya dalam proses inovasi dan pada akhirnya Tuban mengingat proses inovasi yang dilaksanakan secara internal maka penguatan kelembagaan akan menjadi progress yang dapat digunakan dalam mendorong daya saing daerah.

Ucapan Terima Kasih

Kajian ini telah mendapatkan dukungan yang positif, oleh karenanya ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

- Artal-Tur, A. and Kozak, M. (2008) *Destination Competitiveness, the Environment and Sustainability Challenges and Cases, Animal Genetics*. London: CPI Group (UK) Ltd.
- C.R.Kothari (2004) *Research Methodology Methods & Techniques*. Second. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers.
- Craft, J. and Howlett, M. (2013) 'The dual dynamics of policy advisory systems: The impact of externalization and politicization on policy advice', *Policy and Society*. Policy and Society Associates Ltd Partnership, 32(3), pp. 187-197. doi: 10.1016/j.polsoc.2013.07.001.
- David J. Ketchen, J. and Bergh, D. D. (2014) *Social Entrepreneurship And Research*

Methods. First. Edited by J. David J. Ketchen and D. D. Bergh. Oklahoma: Emerald Group Publishing Limited.

Distanont, A. and Khongmalai, O. (2018) 'The role of innovation in creating a competitive advantage', *Kasetsart Journal of Social Sciences*. Elsevier Ltd, pp. 1-7. doi: 10.1016/j.kjss.2018.07.009.

Do, E. (2016) 'the Effect of Innovation on Competitiveness', *Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi*, 0(24), pp. 60-81-81.

Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A. and Luna-Reyes, L. F. (2018) *Erratum to: Policy Analytics, Modelling, and Informatics*. doi: 10.1007/978-3-319-61762-6_19.

Head, B. *et al.* (2014) 'Are policy-makers interested in social research? Exploring the sources and uses of valued information among public servants in Australia', *Policy and Society*. Policy and Society Associates Ltd Partnership, 33(2), pp. 89-101. doi: 10.1016/j.polsoc.2014.04.004.

Leoncini, R. and Montresor, S. (2008) *Innovation and the Creative Process, Towards Innovation with Care*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Vermeulen, B. and Paier eds., M. (2017) *Innovation Networks for Regional Development: Concepts, Case Studies, and Agent-Based Models*. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=1663081&site=ehost-live>.

Weresa, M. A. (2014) *Innovation, human capital and trade competitiveness, Innovation, technology, and knowledge management*. doi: 10.1007/978-3-319-02072-3 T4 - How Are They Connected and Why Do They Matter? M4 - Citavi.